

Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Magetan)

Accelerating Poverty Reduction in The Region (Case Study Of Magetan District Government)

Riyadi Sri Purnomo

Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK

Artikel ini disusun sebagai respon kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang di sampaikan Presiden Joko Widodo untuk menyasar perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). Pelaksanaan Kebijakan RB Tematik mendorong Pemerintah Daerah untuk berupaya melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan melalui berbagai upaya kegiatan. Rumusan permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu; (1) Bagaimana permasalahan pelaksanaan pengentasan kemiskinan di daerah?; (2) Bagaimana Strategi yang diambil dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan di daerah?. Dalam penulisan artikel ini menggunakan analisis kualitatif dengan data dan informasi yang bersumber dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD), studi literatur, dan wawancara bersama narasumber terkait di lokus. Dapat diidentifikasi hambatan dalam akselerasi program pengentasan kemiskinan di daerah yaitu: (1) Masih Banyaknya data kemiskinan yang tidak relevan dengan kondisi sesungguhnya; (2) Proses Bisnis yang belum terpadu antar Perangkat Daerah; (3) Penentuan program dan kegiatan masih terbelenggu nomenklatur aturan dari instansi pusat yang cenderung kurang fleksibel; (4) Pelaksanaan pengentasan kemiskinan belum terukur, terpantau dan terevaluasi dengan baik; (5) Belum tersedianya kebijakan turunan tentang pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Strategi akselerasi pengentasan kemiskinan dilakukan melalui perbaikan tatakelo birokrasi pemerintah daerah melalui pelaksanaan laboratorium RB tematik pengentasan kemiskinan. Mekanisme kerja yang digunakan yaitu **Bangun Komitmen, Internal Assesment, Jajak Target** dan, **Aktualisasi Metode** serta **Keberlanjutan Aksi**, mekanisme ini lebih dikenal dengan istilah (BIJAK). Rekomendasi kebijakan yang disampaikan, yaitu: (1) Perbaikan data kemiskinan merupakan prioritas utama dalam akselerasi pengentasan kemiskinan di daerah; (2) Penyempurnaan proses bisnis pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, (3) Penetapan capaian indikator utama bersama antar perangkat daerah; dan (4) Penyusunan regulasi atau kebijakan teknis yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Daerah yang telah ada; (5) Restrukturisasi program dan kegiatan yang kurang bermanfaat terhadap penurunan angka kemiskinan; (6) Peninjauan kembali kebijakan-kebijakan yang cenderung membatasi inovasi dan restrukturisasi program pengentasan kemiskinan di daerah.

Kata Kunci: Akselerasi, Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik, BIJAK

ABSTRACT

This article was prepared as a response to the policy of accelerating poverty reduction conveyed by President Joko Widodo to target improvements in the implementation of Thematic Bureaucratic Reform (Thematic RB). Implementation of the Thematic RB Policy encourages Regional Governments to strive to accelerate poverty alleviation through various activity efforts. The formulation of the problem raised in this article is; (1) What are the problems with implementing poverty alleviation in the regions?; (2) What are the strategies taken to accelerate poverty alleviation in the region? In writing this article, qualitative analysis was used with data and information sourced from the results of Focus Group Discussions (FGD), literature studies, and interviews with relevant sources at the locus. Obstacles can be identified in accelerating regional poverty alleviation programs, namely: (1) There is still a lot of poverty data that is not relevant to actual conditions; (2) Business Processes that are not yet integrated between Regional Apparatus; (3) Determination of programs and activities is still shackled by the nomenclature of regulations from central agencies which tend to be less flexible; (4) The implementation of poverty alleviation has not been properly measured, monitored and evaluated; (5) There is no derivative policy regarding the implementation of poverty alleviation programs and activities. The strategy to accelerate poverty alleviation is carried out through improving regional government bureaucratic governance through the implementation of thematic poverty alleviation RB laboratories. The work mechanisms used are Building Commitment, Internal Assessment, Target Polling and Method Actualization and Action Sustainability, this mechanism is better known as (BIJAK). The policy recommendations presented are: (1) Improving poverty data is a top priority in accelerating poverty alleviation in the regions; (2) Improving business processes for implementing poverty alleviation programs and activities, (3) Determining the achievements of shared main indicators between regional apparatus; and (4) Preparation of regulations or technical policies which are derivative policies from existing Regional Regulations; (5) Restructuring of programs and activities that are less useful for reducing poverty; (6) Review of policies that tend to limit innovation and restructuring of regional poverty alleviation programs..

Keywords: *Acceleration, Poverty, Thematic Bureaucratic Reform, BIJAK*

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi masalah utama dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan daerah.

selayaknya pemerintah mampu membuat kebijakan khusus yang mampu mengakselerasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar 7,5% pada tahun 2024.



Gambar 1.
Angka Kemiskinan Nasional,
Sumber: BPS,2023.

Presiden Joko Widodo mendorong program penurunan angka kemiskinan menjadi target utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah pada sisa waktu periode pemerintahannya. Dalam RPJMN periode 2020-2024, Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga angka 6,5% – 7,5% di tahun 2024.

Merujuk data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat, sejak pandemi Covid-19, angka kemiskinan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai pertengahan 2021, walaupun mulai turun kembali pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebesar 25,9 juta jiwa, Angka ini lebih baik dibanding angka pada periode sebelumnya yang mencapai 26,16 juta jiwa atau 9,54% ditahun 2022 dan 27,54 juta jiwa atau 10,14% ditahun 2021.

Permasalahan kemiskinan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah. Melihat kondisi kemiskinan yang relatif masih banyak,

Hal tersebut juga serupa dengan apa yang terjadi di pemerintah daerah, besarnya angka kemiskinan juga masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Contohnya di Kabupaten Magetan, kondisi kemiskinan terus mengalami penurunan periode tahun 2017 – 2019. Namun saat pandemi terjadi, angka kemiskinan kembali mengalami lonjakan menjadi 10,35% ditahun 2020 dan menjadi 10,66% di tahun 2021. Hal ini sama persis dengan kemiskinan yang terjadi dalam skala nasional di Indonesia.

Angka kemiskinan di Kabupaten Magetan masih diatas rata-rata kemiskinan secara nasional, namun masih lebih rendah nilainya dibandingkan angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magetan tercatat sebesar 66,748 jiwa atau 9,84% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah ini turun dari tahun 2021 yang mencapai 67,750 jiwa (10,66%), namun masih lebih tinggi nilainya daripada persentase kemiskinan nasional. Dari

jumlah tersebut, sebanyak 9340 keluarga atau 1,47% ditetapkan sebagai data pensasaran keluarga miskin ekstrem tahun 2022.

Namun sejak pandemi terjadi di tahun 2020, kemiskinan di kabupaten Magetan mengalami peningkatan sampai tahun 2021. Dari gambaran ini maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan belum signifikan untuk mampu memberikan dampak yang nyata pada penurunan angka kemiskinan. Tentunya melihat kondisi ini maka diperlukan akselerasi segenap pihak untuk mampu mewujudkan target angka kemiskinan sesuai yang dicanangkan Pemerintah.

Kondisi kemiskinan ini juga ditunjukkan dengan beberapa indikator yang memperlihatkan beberapa kondisi kesejahteraan di Kabupaten Magetan. Pertama, tingkat pengangguran terbuka di

pengangguran terbuka mencapai 16.872 orang atau 4,33% per Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja yang masih menganggur ini akan berpotensi memicu peningkatan angka kemiskinan apabila angkatan kerja yang berada di kabupaten Magetan masih didominasi kelompok berpendidikan SD sederajat yang dibarengi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang masih terbatas.

Angkatan kerja di Kabupaten Magetan masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SD sederajat, begitu pula dengan tenaga kerja yang menganggur masih pula di dominasi oleh tamatan SD. Fenomena ini menjelaskan bahwa potensi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD akan sangat rentan dengan masyarakat miskin, karena upah yang mereka terima juga relatif kecil bila disesuaikan dengan tingkat pendidikannya demikian pula dengan tingkat ketrampilan dan penguasaan teknologi yang

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Magetan Tahun 2021-2022

Keterangan	Nasional		Jawa Timur		Kab. Magetan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
% Penduduk Miskin	10,14%	9,57%	11,40%	10,49%	10,66%	9,84%
Jumlah Penduduk Miskin	27,54 juta	26,36 juta	4.572.730	4.236.510	67.750	66.748
% Penduduk Miskin Ekstrem	4%	2,04%	2,23%	1,80%	1,93%	1,47%
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	10,86 juta	5,59 juta	895,74 ribu	724,33 ribu	12,26 ribu	9,34 ribu

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Kabupaten Magetan yang fluktuatif. Data BPS 2023 menunjukkan angka

dimilikinya. Partisipasi pendidikan dalam pengentasan kemiskinan juga perlu lebih

Tabel 2. Tingkat Pendidikan dan Angkatan Kerja di Kabupaten Magetan 2023

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap angkatan kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ SD	149.578	7175	156753	95,42
SMP	72.286	2302	74588	96,91
SMA	123.537	5427	128964	95,79
Perguruan Tinggi	27.095	1948	29043	93,29

Sumber: BPS, Magetan dalam Angka, 2023.

diperhatikan dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah, merujuk pada data tersebut.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang telah menetapkan strategi percepatan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu: (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil (UMK); dan (4) menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam implementasinya, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) serta di pemerintah daerah. **Pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp.431,3 triliun untuk membiayai 65 program dan 128 kegiatan di 16 Kementerian dan lembaga.** Dampak yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan tersebut **hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% (dari 10,14% pada bulan Maret 2021 menjadi 9,54% pada Maret 2022).** Besarnya anggaran tersebut belum mampu atau belum berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan secara nasional (Paparan Menpan, RB Tematik, 2023).

Hampir serupa dengan fenomena implementasi program dan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan di Tingkat Nasional, Pemerintah Kabupaten Magetan juga telah menganggarkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan pada tahun 2022 sebesar **Rp 95,65 milyar dengan 31 program yang tersebar di 17 OPD.** Besarnya anggaran yang dikeluarkan tersebut **hanya mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Magetan sebesar 0,82%** (dari 10,66% pada tahun 2021 menjadi 9,84% per tahun

2022). Tentunya hal serupa juga dapat terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mensikapi hal tersebut tentunya diperlukan perbaikan tatakelola dalam perumusan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di daerah juga dalam hal implementasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat miskin.

Melihat penyelesaian permasalahan kemiskinan yang belum berjalan dengan optimal, Pemerintah mendesain sebuah program optimalisasi dan akselerasi pengentasan kemiskinan dengan mengkaitkannya dalam program Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). Tujuan pelaksanaan RB tematik ini adalah untuk:

1. Mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. RB harus berkontribusi langsung dalam program prioritas Presiden;
3. Mempercepat penyelesaian permasalahan di Masyarakat.

Penguatan RB melalui model RB tematik ini merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih relatif tinggi di Indonesia. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.

RB tematik bidang pengentasan kemiskinan harus menjadi fokus utama pemerintah pusat dan daerah dalam mendesain, merencanakan, dan melakukan tatakelola dan implementasi program kegiatan pengentasan kemiskinan, termasuk di Kabupaten Magetan yang persentase kemiskinannya masih berada di kisaran 9-10 persen pertahunnya. Kegiatan yang dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ini dilakukan melalui intervensi dengan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan, perbaikan proses

bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi dan restrukturisasi program /kegiatan agar lebih tepat sasaran, dan penyediaan dukungan teknologi informasi (TI).

Banyak kebijakan yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penurunan angka kemiskinan di wilayahnya. Namun dari capaian yang didapatkan masih belum sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo untuk mampu menurunkan angka kemiskinan secara cepat. Tentunya berbagai upaya tersebut terkendala oleh tantangan dan permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam menurunkan persentase angka kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis lebih mendalam terkait tantangan dan permasalahan yang terjadi dan mampu menyediakan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ditemui, agar akselerasi pengentasan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Magetan dapat terwujud sesuai target yang ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, maka dalam artikel ini, rumusan masalah yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana strategi yang tepat dalam mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan?

B1. Tujuan Analisis Kebijakan

Tujuan Analisis ini adalah untuk dapat menemukan dan menganalisis secara lebih mendalam terkait hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten

Magetan, sehingga mampu memberikan solusi melalui rekomendasi kebijakan yang tepat guna mengakselerasi program pengentasan kemiskinan yang berdampak signifikan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magetan.

B2. Kerangka Teori/Konseptual

Dalam artikel ini akan lebih memfokuskan kerangka teori atau konseptual yang menjelaskan peran pemerintah dalam mengemban tugas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di publik terutama yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan.

1. Konsep Kemiskinan Multidimensi

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi kemampuan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Garis kemiskinan menurut kabupaten/kota di Indonesia terdiri dari rupiah/kapita/bulan.

Untuk menganalisis kemiskinan secara akurat tidak hanya berfokus pada sisi pendapatan saja, melainkan harus melihat dimensi-dimensi lain yang menyebabkan seseorang menjadi miskin.

Analisis kemiskinan multidimensi adalah pendekatan komprehensif untuk memahami dan mengukur kemiskinan yang melampaui analisis kemiskinan secara tradisional yang hanya berfokus pada satu dimensi pendapatan. Konsep ini menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang mempunyai banyak segi, mencakup kekurangan dalam berbagai dimensi, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pendekatan ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih akurat dan lebih tepat mengenai kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi dan keterkaitannya.

2. Strategi Pengentasan Kemiskinan Pemerintah

Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Strategi pengentasan kemiskinan oleh TNP2K dapat diterapkan melalui beberapa langkah, seperti:

- Peningkatan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.
- Pengawasan kualitas implementasi kebijakan program.

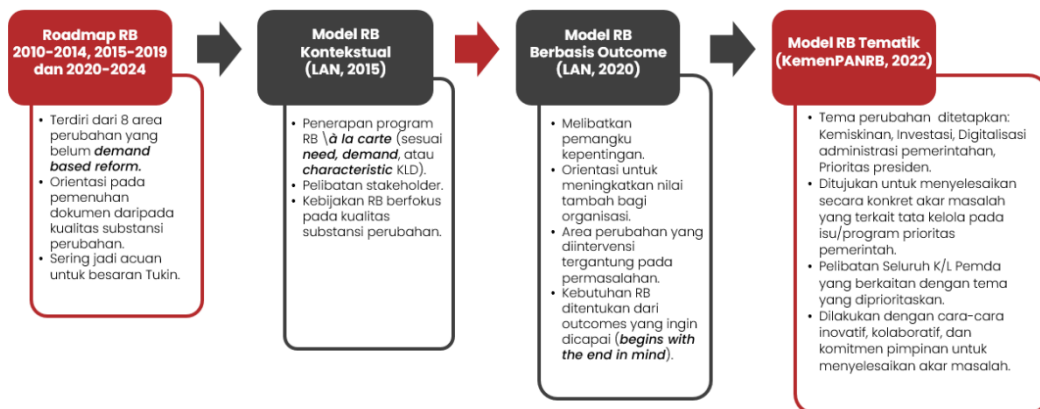
TNP2K juga berperan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas belanja Anggaran Pendapatan Birokrasi Daerah (APBD) dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.

3. Reformasi Birokrasi Berdampak

Penitikberatan terhadap adanya output atau keluaran yang bersifat formalitas menjadikan pelaksanaan RB sebelumnya yang dilakukan di dalam

birokrasi sebagai entitas yang perlu dikembangkan dan diperbaiki secara kontekstual, yang memperhatikan kebutuhan dan persyaratan yang berbeda-beda di setiap kementerian, Lembaga, dan daerah (K/L/D) di Indonesia. Birokrasi kontekstual ini menganggap birokrasi sebagai instrumen pengendalian korupsi, dan mengelola kebijakan reformasi birokrasi, serta reformasi mental para birokratnya. Mengelola gerakan reformasi birokrasi bukan hanya mengelola kinerja pegawai dari sisi absensi dan remunerasi saja, tetapi harus mengenal pasti perubahan mendasar pada aspek-aspek seperti penataan struktur kelembagaan, perubahan budaya kinerja organisasi, perubahan ukuran kinerja, dan melakukan reformasi pada aspek-aspek ini. Pada dasarnya, reformasi birokrasi kontekstual ini menganggap bahwa tidak ada reformasi tanpa resiko, dan reformasi harus dilakukan sebagai tanggungjawab pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Agus Dwiyanto,2015).

Pemerintah berupaya memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik. Dari yang tadinya lebih berorientasi pada output dalam bentuk program-program



Gambar 2.
Perbandingan Model Reformasi Birokrasi
Sumber: PK2AN LAN,2023.

intansi belum menyentuh pada manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

Seharusnya Reformasi Birokrasi merupakan konsep yang menganggap

internal menjadi pelaksanaan program yang berorientasi pada dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat.

Konsep RB Tematik merupakan upaya untuk mengurai dan menjawab serta mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

4. Keterkaitan Reformasi Birokrasi terhadap kemiskinan

Strategi reformasi birokrasi dapat terkait dengan pengentasan kemiskinan secara teoritis melalui berbagai cara. Reformasi birokrasi dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan melalui:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintah: Reformasi birokrasi dapat membantu mengurangi kerugian waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses bisnis, pelaksanaan administrasi, dan tatakelola pemerintah, yang dapat membantu penduduk miskin lebih mudah mengakses pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Reformasi birokrasi dapat membantu memperjelas proses dan tata cara pengeluaran bantuan sosial, melakukan pendataan yang valid, dan merumuskan program-program kegiatan yang diperlukan oleh penduduk miskin untuk lebih berdaya.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Reformasi birokrasi dapat membantu menciptakan dan menrancang program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan sektor-sektor ekonomi untuk menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, dan mempercepat akses pemberian bantuan sosial.

5. Laboratorium Reformasi Birokrasi Tematik

Melihat adanya tantangan baru dalam perbaikan kondisi birokrasi di

Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam pelaksanaan RB tematik berusaha untuk dapat berkontribusi aktif dalam memberikan masukan dan penguatan terhadap pelaksanaan RB tematik yang sedang berlangsung melalui kegiatan Laboratorium Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik.

Laboratorium Kebijakan RB Tematik merupakan sebuah inisiasi kolaborasi antar instansi dengan mendayagunakan analisis kebijakan dan profesional lainnya di bidang kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan kolaborasi bersama LAN dan unsur lainnya di pemerintah daerah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan reformasi birokrasi tematik dalam menghasilkan rencana aksi dan rekomendasi kebijakan berdampak. Tujuan akhirnya untuk mewujudkan kebijakan berkualitas yang dituangkan dalam rencana aksi dan rekomendasi kebijakan, sehingga mampu memberikan dampak signifikan dalam pencapaian target reformasi birokrasi tematik di wilayahnya.

Dalam Laboratorium RB Tematik ini digunakan mekanisme BIJAK yaitu: **Bangun Komitmen** yaitu membangun kolaborasi diantara stakeholders yang ada dalam kegiatan RB tematik, **Internal Assesment** yaitu penentuan program dan kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan serta penentuan permasalahan tata kelola program RB tematik yang terjadi di daerah, **Jajak Target** yaitu penentuan output berdasarkan analisis permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan, **Aktualisasi Metode** yaitu kegiatan yang merupakan penyusunan output yang melibatkan pakar atau akademisi dan instansi vertikal yang relevan dengan program dan aspek tata kelola RB tematik yang dibutuhkan, dan **Keberlanjutan Aksi** yaitu tindak lanjut dari output yang telah dihasilkan (PK2AN,2023).

Dengan menerapkan kolaborasi antara Tim laboratorium RB Tematik dan *counterpart* K/L/D dalam proses menganalisis dan menghasilkan program/kegiatan RB tematik maka akan dihasilkan program kegiatan RB Tematik pengentasan kemiskinan yang merupakan hasil kolaborasi multi pihak antara LAN, Pemerintah Daerah, dan Pakar serta Akademisi. Harapannya pelaksanaan RB tematik pengentasan kemiskinan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan kemiskinan di daerah atau wilayahnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi.

Dalam penulisan artikel ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersumber dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD), Studi Literatur, dan wawancara bersama narasumber terkait di lokus.

Jenis penelitian pada kajian ini berdasarkan tujuannya yaitu penelitian studi kasus, yaitu merupakan penelitian mendalam tentang pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam waktu tertentu dengan melihat kondisi masih lambannya pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam tentang hambatan, permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan.

D. Pembahasan

Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan dalam upayanya melakukan pengentasan kemiskinan yaitu dengan terbitnya beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Daerah no. 4 tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan. kemudian

diterbitkannya Peraturan Bupati Magetan nomor 13 tahun 2019 tentang indikator kemiskinan lokal (berita daerah kabupaten magetan tahun 2019 nomor 13) serta diterbitkannya Keputusan Bupati Magetan nomor 188/132/kept/403.013/2020 tentang pembentukan tim koordinasi, sekretariat tim koordinasi, kelompok kerja, dan kelompok program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Magetan tahun 2020.

1. Kendala dan permasalahan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah disampaikan oleh instansi terkait, didapat informasi bahwa pemicu masih lambannya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan, setidaknya terdapat 5 (lima) permasalahan utama yang di temui dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan, yaitu:

a. Data Kemiskinan yang tidak relevan dengan kondisi sesungguhnya;

Permasalahan data menjadi masalah umum yang ditemui hampir di sejumlah daerah, terutama terkait dengan program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial. Permasalahan yang terjadi dapat berupa data yang tidak valid, yaitu permasalahan masyarakat yang layak dan tidak layak mendapat bantuan, data ganda, status penduduk yang sudah meninggal dan banyak hal lainnya terkait data kemiskinan. Disamping itu banyak sumber data yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan daerah juga menambah kebingungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan.

b. Proses Bisnis yang belum terpadu antar Perangkat Daerah.

Saat ini di Kabupaten Magetan setidaknya terdapat 17 perangkat daerah

yang mengerjakan 31 program kegiatan pengentasan kemiskinan dengan anggaran sebesar 95,65 milyar. Namun dengan banyaknya program, banyaknya perangkat daerah dengan jumlah anggaran yang besar hanya mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Magetan sebesar 0,82% (dari 10,66% pada tahun 2021 menjadi 9,84% pada tahun 2022). Secara proyeksi sederhana tanpa melihat faktor lainnya yang berpengaruh pada kemiskinan, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan membutuhkan waktu kurang lebih tigabelas tahun dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,147 trilyun. Tentunya hal ini tidak efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Magetan.

Dari informasi dan data yang didapat menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengentasan kemiskinan telah menjadi bagian dari tugas dan fungsi yang diemban oleh banyak perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman dan PUPR, Dinas Perdagangan, Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan Daerah, Bappeda. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengentasan kemiskinan, masing-masing perangkat daerah mengimplementasikan secara parsial (berjalan sendiri-sendiri) untuk memenuhi target capaian indikator utama perangkat daerahnya.

Kondisi tersebut menggambarkan terjadinya egosektoral dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Masing-masing perangkat daerah hanya merasa bertanggungjawab dengan pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerahnya saja dan tidak berperan maksimal pada tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya. Penanganan kemiskinan masih didasarkan pada kepentingan organisasi dan tugas fungsi masing-masing. Akhirnya dalam implementasi program dan kegiatan

pengentasan kemiskinan ini terjebak pada tugas dan fungsi masing-masing, kolaborasi yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang multidimensi tidak terlihat dan tidak terbangun karena egosektoral yang masih terjadi.

Kondisi yang terjadi dengan adanya egosektoral ini sangat berpengaruh terhadap harmonisasi tugas dan fungsi di bidang pengentasan kemiskinan. Sehingga pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berjalan lambat dan membutuhkan biaya dan beban anggaran yang sangat besar, namun memberikan dampak yang tidak signifikan pada kesejahteraan masyarakat miskin.

c. Terbelenggu oleh Nomenklatur kebijakan pusat yang kurang fleksibel;

Nomenklatur kebijakan dari pemerintah pusat yang kurang fleksibel dalam pengentasan kemiskinan merujuk pada format dan kode yang digunakan oleh Pemerintah daerah dalam penganggaran program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang berpedoman pada kebijakan organisasi yang lebih tinggi, misalnya Provinsi atau pada tingkatan kementerian. Dalam beberapa kasus, nomenklatur anggaran yang kurang fleksibel dapat menjadi hambatan dalam penganggaran yang efektif dan efisien. Pengklasifikasian kode-kode anggaran yang sudah baku sulit untuk diubah dan harus ditaati oleh pemerintah daerah, menyebabkan restrukturisasi program dan kegiatan sangat sulit untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Usulan-usulan kegiatan yang dijalankan cenderung sama dan monoton dari tahun ke tahun. Pendekatan yang lebih luwes dan fleksibel dalam program-program prioritas Presiden sebaiknya tidak dikunci dengan aturan yang mengikat, sehingga mampu menciptakan program dan kegiatan yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan masyarakat miskin secara langsung. Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam merumuskan penganggaran,

penting dan perlu juga untuk memperhatikan nomenklatur anggaran yang digunakan agar penganggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Permasalahan yang terjadi dalam melakukan pembenahan dan pengoptimalan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan terbentur pada beberapa aturan ditingkat kementerian. Salah satu aturan yang dianggap menjadi kendala dalam melakukan inovasi program dan kegiatan misalnya adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini dirasakan oleh pemerintah daerah agak membatasi dalam mendesain program dan kegiatan yang diperlukan dalam pengentasan kemiskinan.

d. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan belum terukur, terpantau dan terevaluasi dengan baik

Banyak program dan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan, sasaran output yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut belum dikaitkan langsung dengan seberapa besar program atau kegiatan tersebut mampu berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan. Sehingga banyak program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang berhasil memperoleh ketercapaian output yang baik bahkan sangat baik, kemudian capaian IKU juga baik, namun tidak berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Keberhasilan program kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah, tidak sebanding lurus dengan keberhasilan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Restrukturisasi program kegiatan belum dapat dilakukan apabila belum ada alat ukur keberhasilan program. Misalnya dalam kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi yang menargetkan peningkatan pendapatan

petani dan peternak. Kegiatan tersebut terdapat pada beberapa rencana aksi, antara lain penyediaan bibit yang berkualitas, pupuk, dan alat pendukung pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. kegiatan-kegiatan tersebut mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Untuk mengetahui dampak terhadap pendapatan petani, hal ini perlu didukung dengan kegiatan pemantauan tingkat efektivitasnya terhadap peningkatan kondisi ekonomi para petani yang menjadi target sasaran.

e. Belum tersedianya Kebijakan turunan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan

Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan dalam upayanya melakukan pengentasan kemiskinan yaitu dengan terbitnya beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Daerah no. 4 tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan. Peraturan Bupati Magetan nomor 13 tahun 2019 tentang indikator kemiskinan lokal (berita daerah kabupaten magetan tahun 2019 nomor 13) serta diterbitkannya Keputusan Bupati Magetan nomor 188/132/kept/403.013/2020 tentang pembentukan tim koordinasi, sekretariat tim koordinasi, kelompok kerja, dan kelompok program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Magetan tahun 2020.

Namun masih diperlukan adanya kebijakan turunannya, yaitu kebijakan teknis dari Peraturan Daerah tersebut untuk memperjelas tugas dan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Demikian pula masih diperlukan pembaharuan dan penyesuaian indikator kemiskinan lokal dengan aturan lainnya yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran siapa yang layak dan tidak layak untuk masuk dalam kategori masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil analisis awal bahwa Kemiskinan yang terjadi di

Kabupaten Magetan sebagian besar diikuti pula oleh permasalahan lainnya yaitu permasalahan kesehatan berupa AIDS, Tuberkulosa, dan Malaria (ATM), Stunting (Pola Asuh, Gizi), RTLH (Lingkungan), dan kemiskinan itu sendiri. Pengentasan kemiskinan tanpa melihat aspek lain secara keseluruhan atau holistik akan sangat sulit untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinan secara sebenarnya apalagi kemiskinan ekstrim.

2. Strategi Akselerasi Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan

Sebagai Upaya mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan yang masih berjalan lambat, maka dilakukan kolaborasi dalam Laboratorium RB Tematik antara berbagai pihak terkait, dengan tujuan :

1. Membangun komitmen antar OPD untuk mencapai tujuan penurunan angka kemiskinan secara berdampak melalui mekanisme **Bangun Komitmen**
2. **Internal Assesment** yaitu untuk menemukenali masalah dalam pengentasan kemiskinan;
3. **Jajak Target** yaitu penentuan output berdasarkan analisis permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
4. **Aktualisasi Metode** yaitu kegiatan yang merupakan penyusunan strategi dan langkah-langkah dalam hal pencapaian output yang melibatkan pakar atau akademisi, dan
5. **Keberlanjutan Aksi** yaitu tindak lanjut dari output yang telah dihasilkan

Pelaksanaan kolaborasi dalam Laboratorium RB tematik untuk merumuskan strategi kebijakan yang efektif, efisien, dan mendapatkan dukungan publik. Kebijakan efektif dalam arti kebijakan yang tepat dalam memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berada dalam kategori masyarakat miskin. Kebijakan efisien dalam arti memiliki

rasio biaya-manfaat yang rendah. Kebijakan yang didukung publik artinya kebijakan yang dilaksanakan benar-benar bertujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan bisnis, kepentingan elektabilitas atau popularitas, dan kepentingan pribadi atau kelompok.

Dengan menerapkan kolaborasi dalam laboratorium RB Tematik, diperoleh program kegiatan RB Tematik pengentasan kemiskinan yang tepat, dan merupakan hasil kolaborasi multi pihak. Rencana aksi yang dibuat juga dapat dipertanggungjawabkan karena melalui serangkaian tahapan yang didasari atas permasalahan yang mengemuka dan memenuhi kriteria:

- a. *Urgent*, seberapa mendesak masalah tersebut harus diselesaikan;
- b. *Serious*, seberapa serius masalah tersebut perlu dilakukan penyelesaian; dan
- c. *Growth*, seberapa kemungkinan permasalahan tersebut menjadi berkembang makin memburuk.

Menghadapi kendala dan permasalahan tersebut, maka RB tematik pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan akan lebih terfokus mengatasi permasalahan yang urgen, serius, dan dapat berkembang menjadi lebih buruk. Tahapan mekanisme kerja yang dilakukan melalui Laboratorium RB Tematik dengan mekanisme BIJAK:

a. Bangun Komitmen

Langkah awal yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa empati, saling memiliki, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penandatanganan komitmen oleh pimpinan Daerah/Bupati dan seluruh pimpinan perangkat daerah masing-masing, serta tim Laboratorium RB Tematik. Harapannya dalam pelaksanaan Laboratorium RB tematik masing-masing anggota tim mampu menggali permasalahan, mencari

solusi terbaik yang bisa dilakukan oleh lokus, serta berbagi pengalaman dan ilmu.

b. Internal Assesment

Langkah kedua yang dilakukan dalam Laboratorium RB Tematik adalah *internal Assesment*, pada langkah ini menggunakan dua pendekatan dalam menggali permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan. Pendekatan pertama yaitu dengan

- (1) Melakukan analisis terhadap Rencana Aksi Tahunan (RAT) program pengentasan kemiskinan Kabupaten Magetan.
- (2) Diskusi terfokus dengan anggota Tim Laboratorium RB Tematik Kabupaten Magetan.

Pendekatan ini dilakukan untuk melihat kesesuaian program dan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan, melihat besaran anggaran yang direncanakan, dan output yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan, menggunakan beberapa strategi pelaksanaan, yaitu:

- (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah
- (2) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

c. Jajak Target

Berdasarkan *internal Assesment* yang telah dilakukan oleh Tim Laboratorium RB Tematik dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan melalui analisis rencana aksi tahunan pengentasan kemiskinan dan pendekatan diskusi terfokus dengan tim laboratorium RB Kabupaten Magetan. Target-target yang ingin dilakukan dalam perbaikan tatakelola pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan yang dapat dijadikan sebagai panduan tim laboratorium RB tematik Kabupaten Magetan untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan program pengentasan kemiskinan.

Rencana aksi yang disusun yaitu :

- (1) Tersedianya *database* kemiskinan terpadu dan Valid;
- (2) Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kolaboratif pengentasan kemiskinan antar perangkat daerah;
- (3) Tersedianya peraturan turunan tentang penanganan kemiskinan yang diperlukan guna mendukung efektifitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

d. Aktualisasi Metode

Pada tahap ini dilakukan diskusi bersama dengan perangkat daerah, dan pakar kebijakan publik tentang kemiskinan. Permasalahan data yang mengemuka dan menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dapat di atasi dengan gagasan aatu data kependudukan melalui Regsosek. Hal ini merupakan upaya perbaikan atas berbagai kritik atas data Susenas yang antara lain dinilai kurang akurat dan belum bisa ditindaklanjuti dengan program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Masalah validitas data kemiskinan yang banyak dikeluhkan, dapat diatasi dengan membentuk tim khusus oleh Pemerintah Kabupaten Magetan yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data ulang dengan menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Pusat.

Dari hasil kajian yang disampaikan akademi dari universitas Brawijaya melalui analisis gap nilai level terhadap faktor determinan kemiskinan di Kabupaten Magetan dapat diketahui bahwa faktor Pemberdayaan Masyarakat memiliki pengaruh yang paling signifikan bagi penurunan angka kemiskinan. Setelah itu dilanjutkan dengan aktivitas pertanian, akses pendidikan, aktivitas UMKM, akses kesehatan, dan aktivitas pariwisata. Dengan memperhatikan tingkat pengaruh ini, intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Magetan dapat lebih terfokus faktor-faktor yang memberikan pengaruh yang signifikan pada penurunan angka kemiskinan diwilayahnya.

e. Keberlanjutan Aksi

Dengan Analisis yang dilakukan pada rencana aksi tahunan program pengentasan kemiskinan Kabupaten Magetan, terdapat beberapa poin yang dapat menjadi perhatian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Magetan:

- (1) Memperkuat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan lintas perangkat daerah dan para pemangku kepentingan yang dilakukan secara rutin sehingga terbangun komunikasi yang dinamis dan kolaborasi multi pihak.
- (2) Percepatan pembangunan sistem data penduduk miskin terpadu di Kabupaten Magetan. Perbaikan ini menyasar pada perbaikan koordinasi pengelolaan data, termasuk politisasi dalam pengumpulan data kemiskinan, terutama di tingkat paling bawah yaitu tingkat desa, orkestrasi dalam proses validasi dan verifikasi data kemiskinan oleh pemerintah kabupaten, hingga *profiling* penduduk miskin *by name by address* agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.
- (3) Target program-program kerja perangkat daerah, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan masyarakat perlu diarahkan untuk menyasar masyarakat miskin.
- (4) Program-program pengentasan kemiskinan perlu dikaitkan pula dengan potensi wilayah Kabupaten Magetan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Mendorong Tim RB Kabupaten Magetan untuk mendesign alat ukur capaian efektifitas program pengentasan kemiskinan, serta menetapkan indikator - indikator masyarakat miskin yang layak untuk

menerima program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil diskusi terfokus dari tahapan *internal assessment*, serta jajak target dalam Laboratorium RB Tematik, didapatkan kesepakatan bahwa untuk mendukung upaya akselerasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan, perlu disusun Instruksi Bupati yang setidaknya mencakup beberapa hal berikut ini.

- (1) Penegasan bahwa manajemen data terpadu pengentasan kemiskinan akan didampingi dengan sebuah aplikasi sistem pendataan kemiskinan. Setiap perangkat daerah akan terlibat dan berkolaborasi dalam pengelolaan sistem ini, baik input data, *updating*, validasi dan *clearing data*. Sistem ini merupakan satu *platform* yang harus menjadi rujukan bersama dalam menentukan intervensi penanganan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh perangkat daerah, maupun pihak eksternal lainnya.
- (2) Koordinasi rutin dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan data kemiskinan di Kabupaten Magetan.
- (3) Meninjau kembali indikator lokal kemiskinan yang termuat pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan beberapa indikator sesuai dengan dinamika kondisi masyarakat saat ini.

E. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dari tahapan *Internal Assesmen*, dan Jajak Target yang dilakukan dalam Laboratorium RB Tematik dengan menggunakan mekanisme BIJAK diperoleh lima permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan berjalan lambat, yaitu:

1. Data kemiskinan yang tidak relevan dengan kondisi sesungguhnya;

2. Proses bisnis yang belum terpadu antar Perangkat Daerah.
3. Terbelenggu oleh nomenklatur kebijakan pusat yang kurang fleksibel;
4. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan belum terukur, terpantau dan terevaluasi dengan baik
5. Belum tersedianya Kebijakan turunan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan

Melihat permasalahan yang telah teridentifikasi tersebut maka diperlukan kolaborasi multipihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Mulai dari pimpinan daerah, dinas-dinas terkait, Pihak Akademi, NGO dan Lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat miskin itu sendiri. Dari permasalahan tersebut maka strategi yang tepat dalam mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan dituangkan dalam lima rekomendasi kebijakan yaitu:

a. Rekomendasi Kebijakan Pertama :

Perbaikan *database* kemiskinan di Kabupaten Magetan merupakan prioritas utama dalam akselerasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magetan perlu membuat *database* pembandingan dengan data kemiskinan pusat agar dapat diketahui data masyarakat yang layak dan tidak layak menerima program bantuan kemiskinan. Agar data pembandingan ini dapat digunakan dan diterima oleh pemerintah pusat maka indikator-indikator yang digunakan harus sama dan sesuai dengan yang digunakan oleh Pemerintah Pusat baik instrumen yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTS), ataupun dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Kegiatan ini dapat dilakukan bersama antara Dinas Sosial,

Dinas Pemberdayaan Desa, BPS Kabupaten, dan Bappeda.

b. Rekomendasi Kebijakan Kedua:

Untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, maka **diperlukan penyusunan proses bisnis pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan**. Perlu pula ditetapkan capaian indikator utama bersama antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi silo-silo atau ego sektoral antar perangkat daerah. Sehingga satu program kegiatan kemiskinan merupakan tanggung jawab beberapa perangkat daerah secara terpadu dan kolaboratif. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Bagian Organisasi bersama Bappeda.

c. Rekomendasi Kebijakan Ketiga:

Pemerintah Kabupaten Magetan dapat memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan melalui penyusunan kebijakan teknis yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Daerah yang telah ada. Ketiadaan kebijakan teknis akan mempersulit dan mengaburkan perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Kegiatan ini dapat dilakukan antara Bagian Hukum, Bappeda, dan dinas terkait lainnya.

d. Rekomendasi Kebijakan Keempat:

Untuk mengakselerasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan agar memberikan dampak yang signifikan bagi penurunan angka masyarakat miskin di Kabupaten Magetan. Perlu adanya restrukturisasi program dan kegiatan yang kurang memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti program/kegiatan dengan program kegiatan baru, atau menggabungkan dengan program-program yang sejenis, atau melakukan

penyesuaian dalam besaran anggaran. Dengan dilakukannya restrukturisasi program pengentasan kemiskinan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan akan benar-benar tepat untuk digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama antara Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Desa.

e. Rekomendasi Kebijakan Kelima:

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang dinilai cenderung mengunci inovasi dan restrukturisasi program pengentasan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam mendesain program kegiatan pengentasan kemiskinan. Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan dapat dilakukan antara Pemkab Magetan, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenpan RB.

Jalur yang Benar. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

KemenPAN RB. 2023. *Modul RB Tematik Pengentasan Kemiskinan.* Jakarta. KemenPAN RB.

LAN RI,PK2AN. 2023. *Booklet Laboratorium RB Tematik.* Jakarta. LAN RI

Nugroho A.A, Noor.Munawar, Christiani.Charlis.2021. *Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik).* Jurnal Media Administrasi Vol. 6 No. 2 : Oktober.Untag.Semarang.

PK2AN LAN RI. 2020. *Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome.* Jakarta. PK2AN.

Susilastuti, Vera Yuwantari. 2022. *Proses Bisnis Tematik Pengentasan Kemiskinan.* Jakarta. Proyek Perubahan LAN RI.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

BPS. 2023. *Magetan dalam Angka.* Magetan. BPS.

BPS. 2023. *Penduduk Miskin di Indonesia.* Jakarta.BPS.

Budiarjo, B. (2023). Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan: Kebijakan dan Dinamika Pelaksanaannya. *Jurnal Analis Kebijakan*, 7(2), 169-180.Jakarta.

Budiantoro, S., Victoria, F., Wiko, S., Ah, M. dan Dwi, R.,P.,A.,(2013). *Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia.* PRAKARSA Economis Policy Working Paper.

Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.* Jakarta. Pustaka Pelajar.

Dwiyanto, Agus. 2015. *Reformasi Birokrasi Konstektual: Kembali ke*

Dokumen

Paparan Menpan RB.2023. *Reformasi Birokrasi Tematik.* Jakarta. Kementerian PAN RB.

Paparan Bupati Magetan. 2023. *Kondisi Kemiskinan Magetan.*

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor. 4 tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan

Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan.

Website

<https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>

<https://jakarta.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>

<https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat>

[terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html](https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat)

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/reformasi-birokrasi-tematik-sukses-turunkan-kemiskinan-dan-stunting-di-sumatra-barat>

<https://cpps.ugm.ac.id/upaya-penanggulangan-kemiskinan-dari-masa-ke-masa/>

<https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/download/315/pdf>

<https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat>

<https://www.tnp2k.go.id/download/84796-Menanggulangi%20Kemiskinan%20dan%20Mengurangi%20Kesenjangan%20Melalui%20Peningkatan%20Efektivitas%20Kebijakan%20dan%20Program.PDF>